

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data statistik UNHCR, pada akhir tahun 2017, jumlah *Internally Displaced Persons* atau IDP mencapai angka 30.6 juta orang dan merupakan yang paling banyak dari jenis perpindahan lain. Pengungsi (*refugees*) 12.703.179 orang, *returnees* 1.770.736 orang, *stateless people* 3.469.250 orang. Dan Afrika menjadi penyumbang terbanyak baik pengungsi atau IDPs.¹

Internally Displaced Persons (IDP) sendiri didefinisikan sebagai orang atau kelompok orang yang dipaksa untuk melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka akibat konflik bersenjata, perang sipil, pelanggaran hak asasi manusia serta bencana alam yang melibatkan orang atau sekelompok orang tersebut namun belum melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional. Bisa dikatakan alasan perpindahan IDP sama seperti pengungsi internasional yaitu perang, konflik sipil dan perselisihan politik tetapi tetap di dalam negara mereka sendiri dan tidak melewati perbatasan internasional.

Ethiopia merupakan salah satu negara dengan IDP paling banyak di dunia. Sejak tahun 2017 banyaknya konflik etnis yang terjadi di perbatasan menambah jumlah IDP hingga 2.1 juta orang (akhir tahun 2018). Kamp-kamp IDP

¹ UNHCR M.Sibiloni. "Protecting Refugees and the Role of UNHCR" hlm (2014) Diakses dari <http://www.unhcr.org/about-us/background/509a836e9/protecting-refugees-role-unhcr.html> op. 11

menampung sekitar 37.000 orang dalam satu kamp dengan fasilitas yang tidak mencukupi.²

Sementara itu, selama empat dekade terakhir ratusan ribu pengungsi dari negara bagian Somalia, Sudan dan negara-negara lain telah melarikan diri ke Ethiopia.³ Ethiopia menampung ratusan pengungsi dari negara tetangga di kamp-kamp di seluruh negeri. Pada tahun 2014, Ethiopia menampung lebih dari 588.000 pengungsi, dimana kelompok terbesar adalah Somalia (244.286), Eritrea (96.600), Sudan Selatan (208.820) dan Sudan (34.613). Ethiopia menjadi negara Afrika kedua yang paling banyak menampung pengungsi dari negara lain.⁴ Dengan banyaknya pengungsi yang datang, pemerintah Ethiopia kesulitan dalam memenuhi kebutuhan para IDP di Ethiopia, sehingga IDP yang juga telah kehilangan harta benda dan pekerjaan menjadi tergantung kepada bantuan kemanusiaan⁵

Permasalahan mengenai IDP telah menjadi satu permasalahan yang menimbulkan kekhawatiran pemerintah Ethiopia karna selain merupakan negara kedua terbanyak di Afrika yang menampung pengungsi dari luar, di saat yang sama juga memiliki jumlah IDP yang banyak, terutama pada tahun 2018 dimana Ethiopia menjadi negara dengan IDP terbanyak.⁶

² International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. “*Emergency Plan of Action (EPoA) Ethiopia : IDP Population Movement*” hlm 1

³ Institute for Environmental Security of the Netherlands. *Dealing with Energy needs in Humanitarian Crisis Response Operations : A quick Scan of Policies and Best Practices of Humanitarian Aid Organizations and Potential Alternative Energy Sources and Technologies.* (Netherlands, 2009), 21

⁴ UNHCR, “*History of UNHCR in Ethiopia*”. Available from www.unhcr.org accessed 5/10/2018

⁵ Tinbit Amare Dejene. *Displaced in Ethiopia: I have Nothing Left.* November 2018. Diakses 3 Jan 2019 <https://www.nrc.no/news/2018/november/displaced-in-ethiopia-i-have-nothing-left/>

⁶ International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. “*Emergency Plan of Action (EPoA) Ethiopia : IDP Population Movement*” hlm 1

United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) atau disebut juga *UN Refugee Agency* merupakan organisasi global yang berdedikasi untuk memberikan perlindungan dan menyelamatkan hidup pengungsi, orang yang dipaksa pindah dari tempat tinggal mereka dan *stateless people*.⁷ UNHCR merupakan organisasi penanganan pengungsi yang terbesar karena berada dibawah PBB tepatnya dibuat oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1950. Anggaran dasar UNHCR dirancang bersamaan dengan Konvensi 1951 yang berkaitan dengan Status Pengungsi, yang menjadi landasan perlindungan pengungsi dalam beberapa dekade berikutnya.⁸

UNHCR sendiri mulai terlibat dengan IDP pada tahun 1970. Karna permasalahan IDP yang semakin meningkat, PBB kemudian membentuk *The UN Guiding Principles on Internal Displacement* pada tahun 1992 yang menghimbau pemerintah untuk menyediakan perlindungan terhadap warga mereka dari pemindahan sewenang-wenang, menjamin hak mereka pada saat perpindahan dan mengajukan solusi jangka panjang dengan memfasilitasi pemulangan mereka, perpindahan tempat tinggal, integrasi dan re-integrasi⁹

Pada tahun 2006, UNHCR telah dipilih untuk memimpin, mengkoordinir, mengawasi dan memimpin organisasi lain dalam melakukan tugas yang berhubungan dengan perlindungan, tempat penampungan darurat dan koordinasi kamp.¹⁰

⁷ UNHCR "About us", <http://www.unhcr.org/about-us.html> diakses 21/09/2018

⁸ UNHCR M.Sibiloni. "Protecting Refugees and the Role of UNHCR" diakses pada 21/09/2018

⁹ UNHCR M.Sibiloni. "Protecting Refugees and the Role of UNHCR" diakses pada 21/09/2018

¹⁰ UNHCR M.Sibiloni. "Protecting Refugees and the Role of UNHCR" diakses pada 21/09/2018

UNHCR sudah ada dan beroperasi di Ethiopia selama 44 tahun untuk perlindungan pengungsi dan IDP. Pada tahun 2014, UNHCR akan terus memimpin klaster perlindungan di Ethiopia dan memperkuat hubungan dengan pemerintah Ethiopia.¹¹ Dalam menjalankan program, UNHCR bekerjasama dengan agensi *partner* yaitu UN Agencies, IGO dan NGO, agensi pemerintahan federal dan pemerintahan lokal.¹² Pada tahun 2018 UNHCR telah menerima sekitar 160.4 juta dollar *funding* untuk IDP di Ethiopia untuk perihal perlindungan IDP.¹³

Seperti semua manusia, para IDP memiliki hak asasi manusia yang juga disebutkan oleh instrumen hak asasi manusia internasional. IDP juga memiliki hak yang sama seperti warga sipil lain terhadap perlindungan yang diberikan oleh hukum humaniter internasional. *The Guiding Principles on Internal Displacement* telah dibuat sedemikian rupa dengan mengkompilasi undang-undang mengenai hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional yang ada, yang berkaitan dengan IDP.¹⁴

Dalam *The Guiding Principles*, prinsip 18 dikatakan bahwa “semua IDP memiliki hak untuk standar hidup yang mencukupi”. Standar tersebut diantaranya makanan dan air bersih, tempat perlindungan dasar, pakaian yang layak, sanitasi dan layanan kesehatan yang mencukupi, dan kebutuhan-kebutuhan khusus bagi

¹¹ UNHCR Profile Design, hlm 1. <http://et.one.un.org/content/unct/ethiopia/en/home/resources/un-agencies-profiles/united-nations-high-commissioner-for-refugees----unhcr-.html> diakses 3 Jan 2019

¹² UNHCR Profile Design, hlm 2. <http://et.one.un.org/content/unct/ethiopia/en/home/resources/un-agencies-profiles/united-nations-high-commissioner-for-refugees----unhcr-.html> diakses 3 Jan 2019

¹³ UNICEF Ethiopia Humanitarian Situation Report #10 – Reporting Period : October 2018 <https://reliefweb.int/report/ethiopia/unicef-ethiopia-humanitarian-situation-report-10-reporting-period-october-2018> diakses 3 Jan 2019

¹⁴ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner “Questions and Answers about IDPs” <https://www.ohchr.org/en/issues/idpersons/pages/issues.aspx> diakses 21/09/2018

anak-anak dan wanita juga harus terpenuhi ¹⁵. Maka dari kenyataan tersebut, bisa disimpulkan bahwa UNHCR menemui tantangan dalam menjalankan peran perlindungan terhadap IDP di Ethiopia.

Berdasarkan laporan-laporan tentang keadaan IDP di Ethiopia ditemukan bahwa perlindungan terhadap IDP di Ethiopia belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam *The Guiding Principles*. Diperkirakan 857.000 orang telah terpaksa pindah karna konflik tersebut. ¹⁶ Berdasarkan laporan tersebut, diketahui bahwa suplai makanan untuk IDP masih jauh dari cukup. Kebutuhan akan air bersih meningkat dengan pesat namun ketersediaan air bersih masih belum cukup. Mayoritas IDP juga tidak memiliki akses fasilitas sanitasi. Kurangnya fasilitas sanitasi dan kebersihan akan membahayakan kesehatan IDP. ¹⁷ Masalah edukasi untuk anak-anak usia sekolah juga belum terpenuhi. Setidaknya 93.000 anak-anak tidak lagi menerima pembelajaran sekolah, dan dibutuhkan pendidikan dalam skala penuh di tempat pelayanan darurat ¹⁸

Tantangan yang ditemui UNHCR dalam permasalahan IDP juga pernah diteliti oleh Kimenyi Buzoya tentang *Protection Challenges Facing UNHCR in Addressing the Question of IDPs in the Absence of Explicit International Legal Framework : The Case Study of Pader District, Uganda* pada tahun 2009. Peneliti ingin menguji hasil penelitian Buzoya terhadap kasus IDP di Ethiopia karna penelitian Buzoya memiliki kesamaan fitur dengan kasus di Ethiopia. Yang pertama, Ethiopia dan Uganda memiliki kedekatan secara geografis yaitu kawasan

¹⁵ The Guiding Principles on Internal Displacement accessed from UNHCR.org

¹⁶ OCHA "Ethiopia : Conflict Displacement Situation Report" 23 Januari 2018, hlm 1

¹⁷ OCHA, Ethiopia Conflict Displacement, hlm 2

¹⁸ OCHA, Ethiopia Conflict Displacement, hlm 2

Afrika Timur. Secara budaya, Ethiopia dan Uganda juga memiliki kemiripan yaitu menggunakan bahasa Swahili yang dianggap sebagai bahasa pemersatu karena digunakan oleh hampir seluruh negara di Afrika Timur.¹⁹ Uganda pernah mengalami krisis IDP pada tahun 2007 yaitu peringkat ketiga di dunia dan peringkat dua di Afrika dengan jumlah IDP mencapai 1.7 juta orang, jumlah yang hampir sama dengan Ethiopia pada tahun 2018.²⁰ Krisis IDP di Uganda tersebut disebabkan oleh konflik *Lord Resistance Army* (LRA).²¹ Konflik sejenis juga sering terjadi di Ethiopia seperti konflik di perbatasan Oromia yang menyebabkan Ethiopia mencapai angka IDP tertinggi pada tahun 2018. Selain itu, Ethiopia²² dan Uganda merupakan negara yang terbagi kedalam distrik-distrik sehingga sulit bagi NGO untuk melakukan koordinasi secara keseluruhan.²³ Selanjutnya, Ethiopia dan Uganda sama-sama berbatasan dengan negara yang sering menyumbang pengungsi seperti Sudan, Sudan Selatan dan Somalia. Ethiopia dan Uganda juga sama-sama sering mengalami bencana alam terutama kekeringan, banjir bandang dan juga sering terjadi kelaparan.²⁴

Penelitian Buzoya menemukan bahwa ada tiga tantangan yang dihadapi UNHCR dalam mengatasi permasalahan IDP. Yang pertama yaitu *Legal Challenges* yang berhubungan dengan *legal framework* dalam perlindungan IDP,

¹⁹ USA Today, "Culture of East Africa", April 2018 <https://traveltips.usatoday.com/culture-east-africa-17227.html> diakses 30/01/2019

²⁰ Internal Displacement Monitoring Centre, "Global Overview 2007", <http://www.internal-displacement.org/publications/internal-displacement-global-overview-of-trends-and-developments-in-2007> diakses 30/01/2019

²¹ BBC, "Uganda Country Profile", May 2018. <https://www.bbc.com/news/world-africa-14107906> diakses 28/01/2019

²² Ethiopian Embassy, "Ethiopia Profile", <https://ethiopianembassy.be/en/ethiopia/country-profile/> diakses 28/01/2019

²³ Royal African Society, "Uganda", <http://www.royalafricansociety.org/countries/uganda> diakses 28/01/2019

²⁴ Global Facility for Disaster Reduction and Recovery, "Uganda", <https://www.gfdrr.org/en/uganda> diakses 28/01/2019

yang kedua yaitu *Ineffective Coordination and the Effect of Local Dynamics* yang berhubungan dengan dinamika lokal negara dan yang ketiga yaitu *Lack of Peace and Other Security Challenges* yang berhubungan dengan keamanan.²⁵

1.2 Rumusan Masalah

Internally Displaced Person atau IDP telah menjadi kekhawatiran global karna angka IDP semakin meningkat dari tahun ke tahun dan telah mencapai angka lebih dari 30 juta orang. Tahun 2018 Ethiopia menjadi negara dengan IDP terbanyak. Selain itu, Ethiopia juga menjadi negara penampung pengungsi terbanyak kedua di Afrika.. Hal itu menyebabkan pemerintah Ethiopia kesulitan dan warga yang menjadi IDP hidupnya bergantung kepada bantuan kemanusiaan. UNHCR sebagai organisasi yang berdedikasi untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang seperti IDP, telah beroperasi selama 44 tahun di Ethiopia. Pada tahun 2018 UNHCR juga mendapat dana sebesar 160,4 juta dollar untuk menjalankan tugasnya di Ethiopia.

Namun menurut laporan UN *Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (UNOCHA), keadaan IDP di Ethiopia masih belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam *The Guiding Principles on Internal Displacement*. Kurangnya suplai makanan, kurangnya ketersediaan air bersih, kurangnya layanan kesehatan dan sanitasi dan anak-anak usia sekolah tidak lagi menerima pendidikan. Dari data tersebut peneliti menyimpulkan adanya tantangan menemui dalam menjalankan tugasnya di Ethiopia.

²⁵ Kimenyi Buzoya, *Protection Challenges Facing UNHCR in Addressing the Question of IDPs in the Absence of Explicit International Legal Framework : The Case Study of Pader District, Uganda*. (Johannesburg : University of the Witwatersrand,2009), v

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian yaitu apa tantangan yang dihadapi UNHCR dalam menangani permasalahan *Internally Displaced Person* di Ethiopia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan apa tantangan yang dihadapi UNHCR dalam mengatasi permasalahan IDP di Ethiopia

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan kajian Ilmu Hubungan Internasional khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan IDP
2. Memberikan informasi tentang bagaimana tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi oleh organisasi yang menangani isu *refugees* dalam menangani permasalahan IDP
3. Diharapkan dapat menjadi sumber informasi publik mengenai organisasi kemanusiaan, khususnya UNHCR dalam menangani IDP di Ethiopia

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam menganalisis judul yang diangkat, peneliti mencoba bersandar pada beberapa kajian pustaka yang dianggap relevan pada penelitian kali ini. Pustaka yang dijadikan landasan antara lain adalah "*The Challenges and Prospects of*

ChSA '70/30 GUIDELINE' implementation on the performance of NGOs' in Ethiopia - A case study of Food for the Hungry/Ethiopia (FH/Ethiopia)” yang menjelaskan bagaimana tantangan yang dihadapi NGOs di Ethiopia dalam memenuhi persyaratan yang ada dalam 70/30 *guideline*. Pustaka ini menjadi dasar kajian dalam penelitian karna menjelaskan tentang kemungkinan-kemungkinan tantangan dan tantangan yang dialami NGOs di Ethiopia. Pustaka ini juga menjelaskan pentingnya peran organisasi kemanusiaan di Ethiopia karena kondisi negara Ethiopia yang sering terjadi krisis kemiskinan dan kelaparan, konflik dan perpindahan. Akan tetapi, terdapat perbedaan yaitu pustaka ini hanya terfokus pada satu aturan yaitu 70/30 *guideline* dan NGO yang di bahas adalah FH/Ethiopia. Selain itu, penelitian ini juga lebih fokus kepada klasifikasi biaya yang diterapkan oleh aturan tersebut dan menganalisis apakah aturan tersebut sudah seimbang dan sesuai.

Kajian pustaka kedua adalah “*The Widespread Challeges of NGOs in Developing Countries : Case Studies from Iran*” yang menjelaskan tentang bagaimana tantangan NGO yang dihadapi di negara berkembang dalam artikel ini studi kasus Iran. Pustaka ini menjadi landasan karna menjelaskan tantangan-tantangan yang dihadapi NGO namun tidak hanya di Iran, juga tantangan yang mungkin muncul dari level internasional. Akan tetapi, pustaka ini hanya membahas NGO secara umum dan tidak ada satu kajian masalah yang menjadi bahasan.

Kajian pustaka ketiga adalah “*Challenges faced by NGOs in Mobilization of Funds for Operation : The case of United Nations Environmental Programme (UNEP)*” yang menjelaskan tentang tantangan dan tantangan NGO, studi kasus

UNEP dalam memobilisasi dana operasional. Pustaka ini menjadi landasan karena menjelaskan tantangan yang dihadapi NGOs dalam beroperasi. Namun, pustaka ini hanya terfokus pada mobilisasi dana saja.

Kajian pustaka ke empat adalah *Challenges of IDP Protection Research Study on the Protection of Internally Displaced Persons in Afghanistan* yang menjelaskan tentang tantangan dalam menyediakan perlindungan bagi IDP studi kasus Afghanistan. Pustaka ini menjadi landasan karena menjelaskan tantangan yang ditemui NGOs di Afghanistan terkait isu IDP. Namun, pustaka ini hanya menggambarkan tantangan sampai tahun 2012 dan terdapat perbedaan negara yang menjadi studi kasus.

Kajian pustaka ke lima adalah *Protecting Internally Displaced Communities in Somalia* yang didalamnya menjelaskan bagaimana keadaan IDP di Somalia, apa yang menjadi penyebabnya dan bagaimana saran solusi yang diajukan. Pustaka ini menjadi landasan karena menjelaskan kebutuhan perlindungan dan kebutuhan dasar IDP dan bagaimana perlindungan bisa diintegrasikan kedalam sebuah program. Namun, penelitian ini tidak menjelaskan upaya-upaya dan tantangan yang ditemui baik oleh pemerintah lokal ataupun NGO ataupun pihak lain yang berwenang dalam hal terkait IDP.

1.7 Kerangka Pemikiran

1.7.1 *Internally Displaced Person (IDP)*

Internally Displaced Person (IDP) adalah warga sipil yang telah terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka disebabkan oleh alasan yang mirip dengan pengungsi namun belum melewati batas negara dan tidak seperti

pengungsi, tidak dilindungi oleh hukum internasional dan memungkinkan untuk menemui kesulitan dalam menerima bantuan²⁶.

1.7.2 *International Governmental Organizations (IGOs)*

Teuku May Rudi menjelaskan organisasi internasional adalah suatu pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun dengan non-pemerintah pada negara yang berbeda.²⁷

Organisasi Internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaannya, tujuan dan aktivitasnya. Jika dilihat dari keanggotaannya, maka organisasi internasional dapat dibedakan menjadi :

1. *International Governmental Organizations (IGOs)*, yaitu organisasi internasional yang anggotanya terdiri dari dua atau lebih negara berdaulat yang melakukan pertemuan secara reguler dan berkala.
2. *International Non-Governmental Organizations (INGOs)*, yaitu organisasi nonpemerintah yang dibentuk oleh masyarakat atau kelompok kepentingan yang beroperasi di beberapa negara dengan tujuan untuk melindungi hak-

²⁶ Geneva Academy of international humanitarian law and human rights. *International Refugee Law*. http://www.genevaacademy.ch/RULAC/international_refugee_law.php diakses 10/11/2018

²⁷ Rudy, T. May, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, (Bandung :Refika Aditama, 2005), hlm 3

hak minoritas yang tersingkirkan atau tidak terjangkau secara penuh oleh kebijakan pemerintah²⁸

Jika dilihat dari beberapa bentuk diatas, maka UNHCR digolongkan pada *International Governmental Organizations* (IGOs) yang dikategorikan sebagai fungsional (organisasi yang tujuannya umum tapi terbatas). Hal ini sesuai dengan anggotanya yang terdiri dari negara peratifikasi Konvensi 1951 dan fungsinya yang bersifat khusus, yaitu memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi di seluruh dunia dalam keadaan darurat akibat bencana alam, konflik etnis, perang dan lain-lain²⁹

1.7.3 Challenge Faced by UNHCR in IDP Protection

Berdasarkan penelitian Kimenyi Buzoya tahun 2009 terkait IDP di Distrik Pader, Uganda ditemukan bahwa ada tiga tantangan yang dihadapi UNHCR dalam menangani isu IDP:

1. Legal Challenges

a. Gaps in the International Legal Framework for IDPs Protection

Terdapat celah dalam kerangka hukum perlindungan IDP seperti organisasi yang tergabung masih membutuhkan pelatihan lebih jauh tentang IDP dan masalah pemahaman dan pengaturan tentang status IDP masih berbeda-beda disetiap agensi yang terlibat.³⁰

²⁸ Theodore A. Coulumbis dan James H. Wolfe, *Introduction to Internationals Power and Justice* 3Ed (New Delhi : Prentice Hall of India Private Ltd. 1986) hlm 253

²⁹ Theodore A. Coulumbis, *Introduction to Internationals*, hlm 253

³⁰ Kimenyi Buzoya, *Protection Challenges Facing UNHCR in Addressing the Question of IDPs in the Absence of Explicit International Legal Framework : The Case Study of Pader District, Uganda*. (Johannesburg : University of the Witwatersrand,2009) halaman 37

b. Lack of Clear Protection Mandate

Secara umum, kerangka kerja yang legal bagi perlindungan IDP telah ada dan berisi tentang hak-hak bagi IDP namun kerangka kerja tersebut tidak mengikat ke negara sehingga menyebabkan perawatan bagi IDP sering tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh *guiding principles*.³¹

2. *Ineffective Coordination Challenges related to Local Dynamics*³²

Intervensi UNHCR hanya bisa efektif jika didukung oleh aktor lokal seperti pemerintah lokal. Koordinasi yang tidak efektif disebabkan oleh aktor lokal yang tidak suportif terhadap intervensi UNHCR dan masalah-masalah didalam negara tersebut. Hal-hal yang termasuk kedalamnya yaitu :

a. Barrier to Effective International Protection of IDP

Adanya hambatan yang ditemui UNHCR dalam mengupayakan perlindungan yang efektif bagi IDP. Hambatan tersebut berasal dari sikap pemerintah dalam penanganan IDP.

b. Camp Coordination/Management Challenges (CCCM)

Kondisi di dalam kamp penampungan masih kurang fasilitasnya dan adanya kesulitan dalam pelacakan populasi IDP di kamp.

³¹ Kimenyi Buzoya, *Protection Challenges*, halaman 39

³² Kimenyi Buzoya, *Protection Challenges*, halaman 41

c. *Freedom of Movement and Freedom of Choices of IDPs*

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam guiding principle bahwa IDP memiliki hak untuk meninggalkan kamp jika mereka ingin dan juga berhak untuk tetap tinggal di kamp jika mereka masih ragu untuk kembali. Hal ini disalahi oleh pemerintah dengan membatasi hak-hak IDP tersebut.

d. *Gender Based Violence (GBV)*

Menurut UNHCR, tingginya tingkat GBV disuatu negara akan mempengaruhi kondisi keamanan IDP.

e. *Population Data Collecting Challenges*

Data demografis terkait IDP tidak dikumpulkan dengan rutin dan tidak efisien dikarenakan berbagai alasan baik dari internal pemerintahan maupun dari luar seperti faktor bahasa.

f. *Inadequate Social and Humanitarian Services*

UNHCR menemui tantangan dalam memenuhi kebutuhan IDP karena negara sejak awal sudah kekurangan layanan sosial dan kemanusiaan menyebabkan pekerjaan UNHCR menjadi lebih berat dalam pemenuhan perawatan IDP.

3. *Lack of Peace and Other Security Challenges*

a. *Security and Prospect of Peace .*

Hal-hal seperti konflik internal dapat menjadi tantangan dalam operasi perlindungan IDP³³

³³ Kimenyi Buzoya, *Protection Challenges* halaman 53

b. IDP Return and Camp Closure

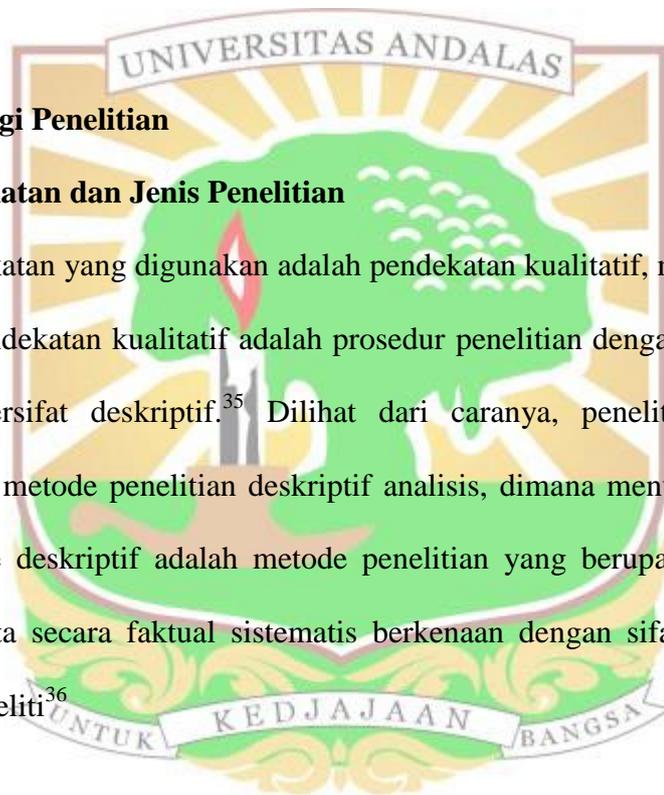
Penutupan kamp secara sepihak yang dilakukan oleh pemerintah sedangkan IDP belum memiliki kesiapan untuk pindah baik dalam hal persiapan barang dan keamanan.³⁴

Ketiga tantangan tersebut peneliti gunakan sebagai kerangka pemikiran dalam menganalisis tantangan UNHCR dalam menangani isu IDP di Ethiopia.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, menurut Gogdan dan Guba, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian dengan menghasilkan data yang bersifat deskriptif.³⁵ Dilihat dari caranya, penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dimana menurut Usman dan Albar, metode deskriptif adalah metode penelitian yang berupaya memberikan gambaran fakta secara faktual sistematis berkenaan dengan sifat populasi atau objek yang diteliti³⁶



1.8.2 Batasan Masalah

Penelitian ini nantinya akan dibatasi pada tahun 2016-2019. Karena pada tahun-tahun tersebut Ethiopia tercatat sebagai negara dengan IDP terbanyak di

³⁴ Kimenyi Buzoya, *Protection Challenges* halaman 56

³⁵ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), halaman 76.

³⁶ Purnomo Setiday Akbar dan Usman, *Metode Penelitian Sosial* 9Jakarta : bumi Aksara, 2006), halaman 42

dunia. Oleh sebab itu peneliti menilai bahwa pada tahun ini menarik untuk melihat tantangan UNHCR dalam menangani IDP di Ethiopia.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Tingkat analisis dan unit analisis dalam penelitian hubungan internasional harus ditentukan untuk kefokusannya dalam membahas permasalahan yang diangkat. Dengan menentukan objek tingkat analisis dan unit analisis, peneliti bisa fokus untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena hubungan internasional. Unit analisis yaitu perilaku objek yang menjadi landasan keberlakuan pengetahuan yang digunakan sedangkan unit eksplanasi adalah unit yang menjadi penjelas dari unit analisis.³⁷ Maka, berdasarkan uraian di atas, unit analisis dalam penelitian ini adalah UNHCR dengan unit eksplanasi *Internally Displaced Person* di Ethiopia dan level analisis yaitu negara, yakni Ethiopia.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dipahami sebagai tahapan yang dilakukan yaitu melakukan pencarian, penelusuran dan pengumpulan dari sumber-sumber yang relevan dan berhubungan dengan penelitian.³⁸ Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dokumen-dokumen tentang program perlindungan IDP oleh IASC dan UNHCR, artikel berita dan *report* yang berhubungan dengan kinerja agensi-agensi dan *situation report* dari agensi tentang keadaan IDP di Ethiopia. Selain itu peneliti juga akan mengumpulkan data tentang statistik IDP dari *Internal*

³⁷ Joshua S. Goldstein, John C. Pavehouse, *Level of Analysis* (London : Pearson International Edition International Relations, Eighth Edition, 2007) halaman 17

³⁸ Lawrence W. Neuman, *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approach* 3rd Edition (Boston : Allyn and Bacon, 1997) halaman 70

Displacement Monitoring Centre, berita dari CNN, BBC, *The Reporter Ethiopia*, *Africa Today* maupun dari portal pemerintahan Ethiopia.

1.8.5 Teknik Pengolahan Data dan Analisis

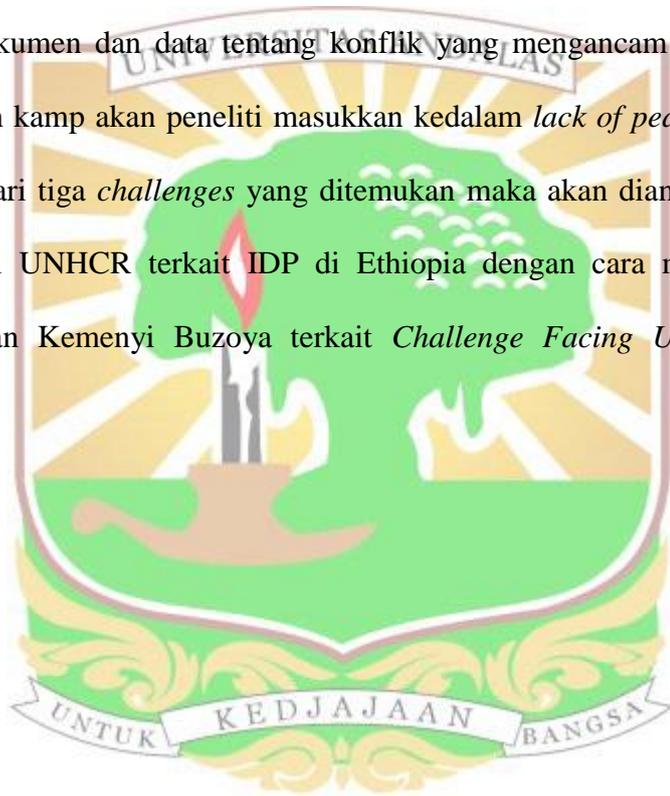
Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan penelusuran data-data yang telah dilakukan secara mendalam. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan identifikasi dan pencarian pola-pola umum hubungan dalam kelompok data yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan.³⁹ Di dalam penelitian ini, setelah data-data dikumpulkan, peneliti nantinya akan mendeskripsikan bentuk-bentuk tantangan yang dihadapi UNHCR dalam menangani IDP di Ethiopia.

Teknik analisis data dalam penelitian ini berangkat dari adanya tantangan UNHCR dalam mengatasi permasalahan IDP di Ethiopia. Penelitian menggunakan konsep *Challenge Facing UNHCR in IDP Protection* untuk membantu peneliti dalam menganalisis tantangan yang dihadapi UNHCR terkait IDP di Ethiopia, selain itu juga menguji temuan Kemenyi Buzoya tentang *Challenge Facing UNHCR in IDP Protection*. Di dalam konsep ini dijelaskan tantangan-tantangan UNHCR terkait IDP. Konsep yang digunakan adalah konsep dari hasil temuan Kemenyi Buzoya yang menjelaskan tantangan UNHCR terkait IDP.

Dalam tulisannya disebutkan bahwa ada tiga *challenges* yang dihadapi UNHCR dalam mengatasi IDP studi kasus di Uganda yaitu *legal challenge*, *ineffective coordination with local dynamics* dan *lack of peace and other security*

³⁹ Catherine Marshall dan Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitative Research 3e* (California: Sage Publications Inc, 1999), hal 150.

challenges. Dokumen dan data yang peneliti temukan yang berhubungan dengan perbedaan kerangka kerja dan pendefinisian IDP serta tantangan oleh karena badan hukum perlindungan IDP yang tidak mengikat akan peneliti kelompokkan kepada *legal challenges*. Dokumen dan data yang berhubungan dengan sikap pemerintah yang tidak kooperatif, masalah manajemen kamp, GBV, masalah dalam pengumpulan data, HIV/AIDS dan kurangnya layanan kemanusiaan akan peneliti kelompokkan kepada *ineffective coordination with local dynamics*. Sementara dokumen dan data tentang konflik yang mengancam keamanan IDP dan penutupan kamp akan peneliti masukkan kedalam *lack of peace and security challenges*. Dari tiga *challenges* yang ditemukan maka akan dianalisis tantangan yang dihadapi UNHCR terkait IDP di Ethiopia dengan cara membandingkan dengan temuan Kemenyi Buzoya terkait *Challenge Facing UNHCR in IDP Protection*.



1.9 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan berisi alasan peneliti tertarik untuk melihat tantangan UNHCR dalam penanganan IDP di Ethiopia. Bab ini akan mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian, manfaat penelitian, teori dan konsep serta metodologi dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II : UNHCR sebagai Lead Agency yang Menangani IDP

Bab ini akan berisi deskripsi tentang UNHCR, mulai dari sejarah, struktur dan cara kerja UNHCR dalam penanganan IDP. Dalam bab ini juga peneliti juga akan menjelaskan tentang *The Guiding Principles on Internal Displacement* yang menjadi landasan bagi UNHCR. Kemudian pada bab ini juga akan dijelaskan bagaimana UNHCR bertindak dalam penanganan IDP.

BAB III : *Internally Displaced Person* di Ethiopia

Bab ini akan menjelaskan keadaan Ethiopia, IDP di Ethiopia dan dampaknya terhadap pemerintahan Ethiopia sendiri. Pada bab ini juga akan menjelaskan bagaimana aktivitas UNHCR dalam penanganan IDP di Ethiopia

BAB IV : Tantangan UNHCR dalam menangani masalah IDP di Ethiopia

Bab ini akan berisi analisis terhadap tantangan UNHCR dalam menangani masalah IDP di Ethiopia menggunakan konsep *Challenges facing UNHCR in IDP Protection*. Pada bab ini nantinya akan dilihat apa saja tantangan yang dihadapi

UNHCR dalam penanganan IDP di Ethiopia. Kemudian akan didapatkan hasil yang dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB V : Penutup/Kesimpulan

Bab ini akan berisikan ringkasan dari keseluruhan pembahasan dari hasil penelitian ini, sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini.

